



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI HASAN
2. Jabatan : MENTERI PERDAGANGAN
3. NHK : 35483

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 13.245.108.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 569.481.300
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/342 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.249.206.240
3. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 755.376.300
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1427 m2/958 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.542.419.200
5. Tanah dan Bangunan Seluas 918 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.603.448.000
6. Tanah Seluas 1047 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.678.393.520
7. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 506.038.320
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/92 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 423.765.120
9. Tanah Seluas 3700 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 916.980.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.000.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



2. MOBIL, TOYOTA ALPARD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.600.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	4.990.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.777.515.467
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	32.612.623.467

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 32.612.623.467

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.